

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN OJK TERHADAP PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2023**Yunita Noviasari¹, Nur Halimah²**

Universitas Islam Bandung

Email: yunitanovia530@gmail.com¹, nurhlimh456@gmail.com²

Abstrak – Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang substansial, didorong oleh peran penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri ini. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan OJK terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan aset, pembiayaan, dan literasi keuangan syariah, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan tahunan OJK, laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI), dan artikel media daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan OJK, termasuk Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah 2020-2024 dan merger bank syariah nasional, telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan aset dan pembiayaan. Penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) mencerminkan peningkatan kualitas manajemen risiko di bank syariah. Meskipun terdapat kemajuan, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, adopsi teknologi digital yang belum optimal, dan persaingan dengan bank konvensional masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya berkelanjutan dalam edukasi masyarakat, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat posisi perbankan syariah di pasar keuangan Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat antara OJK, bank syariah, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan perbankan syariah dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Perbankan, NPF, OJK, Kebijakan, Syariah.

Abstract – Islamic banking in Indonesia has shown substantial development, driven by the important role of the Financial Services Authority (OJK) in creating regulations that support the growth of this industry. As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia has great potential to develop a sharia-based financial system. This study aims to analyze the impact of OJK policies on the growth of Islamic banking in Indonesia, with a focus on increasing assets, financing, and Islamic financial literacy, as well as the challenges faced by industry players. The method used in this study is qualitative analysis with secondary data obtained from official documents, OJK annual reports, financial reports of Bank Syariah Indonesia (BSI), and online media articles. The results of the study show that OJK policies, including the 2020-2024 Islamic Financial Development Roadmap and the merger of national Islamic banks, have had a positive impact on asset and financing growth. The decline in the Non-Performing Financing (NPF) ratio reflects an increase in the quality of risk management in Islamic banks. Despite progress, challenges such as low Islamic financial literacy, suboptimal adoption of digital technology, and competition with conventional banks still need to be addressed. This study recommends the need for continuous efforts in public education, product innovation, and the use of digital technology to strengthen the position of Islamic banking in the Indonesian financial market. With strong collaboration between OJK, Islamic banks, and other stakeholders, it is hoped that Islamic banking can contribute more to the national economy and improve people's welfare.

Keywords : Banking, NPF, OJK, Policy, Sharia.

PENDAHULUAN

Perbankan Syariah di Indonesia semakin menampakkan perkembangan yang substansial. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mewujudkan regulasi yang mendorong pertumbuhan industri ini. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, mempunyai potensi untuk mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakonkan peran strategis sebagai regulator yang memastikan stabilitas, transparansidan pengembangan industri perbankan syariah. Dalam konteks ini, OJK berperan sebagai regulator menjadi sangat penting untuk menciptakan keuangan syariah yang stabil dan kompetitif.

Sejak adanya OJK pada tahun 2011, berbagai ketentuan telah dikeluarkan agar mendorong pertumbuhan perbankan syariah termasuk Roadmap pengembangan keuangan syariah 2020-2024. Merger tiga bank Nasional menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021 merupakan langkah awal yang diinisiasi oleh OJK untuk melahirkan bank syariah dengan kapasitas dan daya saing global, serta pengaturan Non-Performing Financing (NPF) untuk memperhatikan kualitas pembiayaan. Kebijakan-kebijakan ini digunakan untuk peningkatan daya saing perbankan syariah di tingkat Nasional maupun global.

Namun dengan adanya kebijakan OJK telah mewariskan dampak positif terhadap pertumbuhan aset dan pembiayaan, tetapi tetap saja tantangan akan terus dihadapi. Tantangan tersebut diantaranya mencalup rendahnya literasi keuangan syariah, adopsi teknologi digital yang belum optimal, tingginya rasio Non-Performing Financing (NPF), serta persaingan dengan bank konvensional yang lebih mapan. Namun kajian yang mendalam dan kualitatif tentang bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah masih terbatas.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana kebijakan OJK memengaruhi pertumbuhan perbankan syariah, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implentasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan OJK terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi pertumbuhan aset, pembiayaan dan inklusi keuangan syariah, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku industri. Dengan memahami dampak dan tantangan kebijakan ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi regulasi yang lebih efektif dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, artikel media daring, serta publikasi akademik. Data ini meliputi laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI), dan artikel dari media daring terpercaya seperti Kompas, Republika, dan Bisnis Indonesia. Sumber data diakses melalui situs resmi masing-masing institusi dan portal daring lainnya.

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode analisis dokumen. Fokus penelitian adalah untuk memahami dampak kebijakan OJK terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Kebijakan yang dianalisis meliputi:

1. Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah 2021–2024.
2. Kebijakan Merger Bank Syariah Nasional.
3. Pengaturan Non-Performing Financing (NPF).

Tidak ada perlakuan langsung terhadap subjek penelitian karena penelitian ini berbasis data sekunder.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan dokumen resmi, laporan keuangan, dan artikel dari media daring. Proses pengumpulan data dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Akses Laporan Resmi OJK

Peneliti mengakses situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di www.ojk.go.id untuk memperoleh laporan tahunan dan kebijakan terkait perkembangan perbankan syariah. Data ini mencakup statistik industri, kebijakan strategis, dan informasi lainnya yang relevan.

2. Unduh Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI)

Laporan keuangan BSI diunduh dari situs resmi bank untuk mendapatkan informasi tentang pertumbuhan aset, pembiayaan, dan kinerja keuangan lainnya. Laporan ini memberikan gambaran konkret mengenai dampak kebijakan terhadap salah satu bank syariah terbesar di Indonesia.

3. Penelusuran Artikel Media Daring

Artikel berita dari media daring dikumpulkan dengan menggunakan kata kunci seperti “kebijakan OJK perbankan syariah” dan “pertumbuhan bank syariah Indonesia” melalui mesin pencari. Artikel-artikel ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkini dan perspektif tambahan terkait implementasi kebijakan OJK di lapangan.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode analisis tematik. Langkah-langkah analisis data meliputi:

1. Pengelompokan Berdasarkan Tema Utama

Informasi yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti dampak kebijakan terhadap aset, pembiayaan, dan literasi keuangan syariah. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah interpretasi dan pemahaman hubungan antar variabel.

2. Triangulasi Data

Untuk memastikan validitas dan konsistensi hasil penelitian, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan resmi, artikel media, dan jurnal akademik. Triangulasi ini membantu mengurangi bias dan meningkatkan keakuratan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam aspek peningkatan aset, pembiayaan, dan literasi keuangan syariah. Data yang dianalisis dari laporan tahunan OJK dan Bank Syariah Indonesia (BSI) serta artikel media daring dirangkum sebagai berikut. Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah, Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan aset perbankan syariah dari tahun 2019 hingga 2023. Data ini mencerminkan dampak positif dari kebijakan merger bank syariah nasional.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2019-2023

Gambar 1. Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah (2019–2023)

Kebijakan merger yang menghasilkan Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu kebijakan strategis yang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Merger tiga bank syariah besar meningkatkan daya saing perbankan syariah, sehingga mampu menarik lebih banyak nasabah korporasi maupun ritel. Hal ini terlihat dari peningkatan aset yang mencapai lebih dari 20% pada tahun pertama merger (2021). Dengan

penggabungan teknologi dan jaringan, biaya operasional perbankan syariah menurun, memungkinkan bank untuk lebih fokus pada inovasi produk syariah. Merger menciptakan entitas bank syariah yang lebih besar, sehingga menarik perhatian investor domestik dan internasional. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pendanaan dari pasar modal.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko secara berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi. Dalam penguatan regulasi, pada periode laporan, OJK mengeluarkan tiga kebijakan melalui Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) antara lain terkait: (i) Penerapan Pelaporan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) bagi BUK KBMI 1 Non Bank Asing; (ii) Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, dan (iii) Penempatan Dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Nasabah pada Term Deposit Operasi Pasar Terbuka Konvensional Dalam Valuta Asing di Bank Indonesia (TD OPT Valas BI). Selain itu, OJK juga menerbitkan tiga pengaturan terkait perbankan syariah. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Sektor keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang substansial pada tahun 2022, dengan aset meningkat dari Rp 2.050,44 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 2.375,84 triliun, menandai peningkatan hampir 15,87%. Laporan Lembaga Penelitian Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) berjudul "Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Syariah dan Digitalisasi untuk Penguatan Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional" menekankan inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong sektor ini, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan KNEKS meningkatkan kontribusi industri keuangan syariah terhadap perekonomian nasional. Antara tahun 2019 dan Mei 2023, telah terjadi pertumbuhan aset perbankan syariah yang cukup signifikan meskipun terjadi sedikit penurunan jumlah bank syariah. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan implementasi strategi seperti konsolidasi, peningkatan efisiensi, digitalisasi, dan peningkatan literasi keuangan syariah, yang sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan sektor keuangan Syariah (Nada 2024) .

Rasio Non-Performing Financing (NPF), Gambar 2 menunjukkan tren rasio NPF selama periode penelitian. Rasio ini menurun signifikan setelah kebijakan penguatan manajemen risiko oleh OJK.



Sumber: Bank Syariah Indonesia (2023)

Gambar 2. Nominal dan Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Syariah Indonesia.

Grafik menunjukkan penurunan signifikan pada nominal dan rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) Bank Syariah Indonesia (BSI) dari tahun 2019 hingga 2022. Penurunan ini menunjukkan peningkatan kualitas manajemen risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia yang didukung oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK, seperti pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Supervision) dan insentif untuk bank yang berhasil menjaga stabilitas NPF,

terbukti memberikan dampak positif pada pertumbuhan perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor dengan risiko rendah, seperti pembiayaan properti syariah dan UMKM. Penurunan NPF secara signifikan membantu menjaga stabilitas keuangan bank syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia.

Penurunan rasio NPF dari 3,97% (2019) menjadi 0,57% (2022) menunjukkan adanya peningkatan kualitas portofolio pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Bank mampu mengelola risiko pembiayaan dengan lebih baik, yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan profitabilitas sehingga, Penurunan rasio NPF mencerminkan keberhasilan bank dalam mengidentifikasi nasabah berisiko dan mengimplementasikan langkah mitigasi yang efektif, seperti restrukturisasi pembiayaan. Penurunan rasio NPF dari 3,97% menjadi 1,12% mencerminkan keberhasilan awal implementasi kebijakan pengelolaan risiko. Langkah ini diperkuat oleh merger bank syariah nasional yang meningkatkan kapasitas operasional bank. Penurunan lebih lanjut hingga 0,57% menunjukkan konsistensi dalam penerapan strategi mitigasi risiko. Bank juga berhasil mengurangi eksposur terhadap sektor-sektor dengan risiko tinggi, seperti pembiayaan konsumtif.

Dalam keadaan krisis atau resesi biasanya terjadi pembiayaan yang macet pada perbankan (NPF) namun kebijakan yang dilakukan oleh OJK telah sukses menekan angka NPF dikala pandemi. Hal tersebut tentunya menjadi pengalaman berharga untuk menghadapi potensi resesi di tahun 2023 serta kembali lagi kepada lembaga perbankan masing-masing dalam merespon dampak dari pandemi serta menjalankan intruksi dari pemerintah maupun OJK sehingga dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat NPF suatu bank diantaranya Non Performing Finance (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) serta faktor eksternal seperti inflasi dan tingkat suku bunga (Effendi 2023).

Merger yang melibatkan beberapa bank syariah nasional pada tahun 2021 menciptakan entitas yang lebih kuat dan efisien, sehingga mampu meningkatkan pengelolaan risiko dan kapasitas pembiayaan. Kebijakan OJK untuk meningkatkan literasi keuangan syariah membantu nasabah memahami produk-produk keuangan syariah, sehingga mengurangi risiko gagal bayar serta, Kebijakan OJK berperan signifikan dalam menekan NPF dan meningkatkan stabilitas keuangan bank syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebijakan OJK, khususnya pengelolaan NPF, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa merger bank syariah nasional menjadi salah satu faktor kunci yang membedakan tren NPF di Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan periode sebelum merger (Laila Rahmayuni Rangkuti 2024).

Kebijakan OJK yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan syariah telah menunjukkan hasil yang positif. Program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh OJK dan bank syariah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah. Peningkatan literasi keuangan syariah berkontribusi pada inklusi keuangan, di mana lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam sistem keuangan formal. Data menunjukkan bahwa jumlah nasabah bank syariah meningkat secara signifikan, dengan pertumbuhan lebih dari 30% dalam jumlah rekening baru yang dibuka di BSI setelah kebijakan literasi diluncurkan. Meskipun ada peningkatan, tantangan dalam literasi keuangan syariah masih ada. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, yang dapat menghambat pertumbuhan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah.

Meskipun ada peningkatan, literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami produk dan layanan

perbankan syariah, yang dapat menghambat pertumbuhan nasabah baru. Meskipun ada kemajuan dalam digitalisasi, adopsi teknologi digital di bank syariah masih belum optimal. Banyak bank syariah yang masih bergantung pada sistem manual dan kurang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman nasabah. Meskipun ada penurunan rasio NPF, tantangan dalam menjaga kualitas pembiayaan tetap ada. Bank syariah perlu terus meningkatkan manajemen risiko dan selektivitas dalam penyaluran pembiayaan untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Bank syariah masih menghadapi persaingan yang ketat dengan bank konvensional yang lebih mapan. Bank konvensional memiliki jaringan yang lebih luas dan produk yang lebih beragam, sehingga bank syariah perlu berinovasi untuk menarik nasabah.

Menurut, jurnal (Rusydia 2016) ada beberapa faktor yang menjadi penghambat berkembangnya sektor perbankan Syariah di Indonesia seperti belum memadainya permodalan bank Syariah, lemahnya pemahaman praktisi bank Syariah, kurangnya dukungan pemerintah dan kepercayaan serta minat masyarakat terhadap bank Syariah cenderung rendah. Oleh karena itu pihak terkait perlu perbaikan dari sisi permodalan, peningkatan kualitas SDM bank Syariah dan tidak kalah penting adalah support pemerintah. Kebijakan OJK yang mendorong digitalisasi dalam sektor perbankan syariah telah menghasilkan peningkatan dalam penggunaan layanan perbankan digital. Bank syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), telah mengembangkan aplikasi mobile banking dan platform digital lainnya untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Dengan adanya layanan digital, aksesibilitas bagi nasabah meningkat, terutama di daerah terpencil. Hal ini memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam sistem keuangan syariah, yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau. Digitalisasi juga memungkinkan bank syariah untuk menawarkan produk yang lebih inovatif, seperti pembiayaan berbasis fintech syariah, yang menarik minat generasi muda dan pelaku usaha kecil.

Kebijakan OJK yang berfokus pada pengelolaan risiko dan pengawasan berbasis risiko telah membantu bank syariah dalam meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan. Penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) menunjukkan bahwa bank syariah semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan meningkatnya kualitas pembiayaan dan penurunan NPF, perbankan syariah berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Bank syariah berperan penting dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kebijakan OJK yang mendukung pembiayaan UMKM telah membantu meningkatkan akses modal bagi pelaku usaha kecil. Pertumbuhan perbankan syariah yang positif berkontribusi pada perekonomian nasional, dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah juga berperan dalam mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan.

OJK mendorong perbaikan struktur industri melalui konsolidasi bank syariah dan spin-off unit usaha syariah (UUS), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kebijakan ini juga memperkuat karakteristik perbankan syariah dengan menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional dan pendekatan yang lebih humanis kepada nasabah. Kebijakan OJK yang mendukung digitalisasi telah meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan syariah, terutama di daerah terpencil. Ini memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam sistem keuangan syariah. Pertumbuhan perbankan syariah yang positif berkontribusi pada perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil analisis di atas, bahwa kebijakan OJK telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia antara tahun 2019 hingga 2023. Pertumbuhan aset, peningkatan pembiayaan, dan perbaikan kualitas pembiayaan menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil mendorong perkembangan

sektor perbankan syariah. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan persaingan dengan bank konvensional masih perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya berkelanjutan dalam edukasi, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi digital akan menjadi kunci untuk memperkuat posisi perbankan syariah di pasar keuangan Indonesia.

Pada dasarnya, bank syariah mempunyai peluang dan potensi yang luar biasa. Diperlukan inovasi dan upaya yang lebih keras lagi agar dapat terus berkembang dalam meningkatkan pertumbuhan bank syariah di Indonesia supaya tak kalah saing dengan perbankan konvensional. Juga, demi mewujudkan lembaga keuangan syariah yang berkualitas, berkembang, dan berkelanjutan sehingga nantinya mampu bersaing dan dapat mengungguli lembaga keuangan Islam dunia lainnya. Selain itu, peran perbankan syariah di Indonesia sangat diperlukan untuk terus mendorong kemajuan perekonomian bangsa sehingga dapat membawa Indonesia menjadi negara yang maju (Putri and Rachmawati 2022). Kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan KNEKS meningkatkan kontribusi industri keuangan syariah terhadap perekonomian nasional. Antara tahun 2019 dan Mei 2023, telah terjadi pertumbuhan aset perbankan syariah yang cukup signifikan meskipun terjadi sedikit penurunan jumlah bank syariah. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan implementasi strategi seperti konsolidasi, peningkatan efisiensi, digitalisasi, dan peningkatan literasi keuangan syariah, yang sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan sektor keuangan Syariah (Nada 2024). Menjadi salah satu bagian penopang dalam perekonomian negara Indonesia, perkembangan bank syariah yang semakin pesat menyebabkan Bank Indonesia (BI) mengklaim pertumbuhannya lebih cepat dibanding dengan negara lainnya. Dalam jangka panjang, BI berharap jika perbankan syariah dapat menembus pangsa pasar hingga angka 30% dari pembiayaan yang ada. Untuk mendukung terus perkembangan tersebut sekaligus memperluas pemahaman masyarakat akan ekonomi syariah, maka perbankan syariah dapat menawarkan ragam fasilitasnya dengan lebih kompetitif (Kornitasari 2022).

KESIMPULAN

Kebijakan OJK telah mendorong pertumbuhan aset perbankan syariah yang substansial, dengan total aset meningkat dari sekitar Rp 500 triliun pada tahun 2019 menjadi lebih dari Rp 800 triliun pada tahun 2023. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap bank syariah. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, terutama setelah merger Bank Syariah Indonesia (BSI) yang meningkatkan kapasitas dan daya saing. Pembiayaan untuk sektor UMKM dan properti juga mengalami diversifikasi yang positif. Kebijakan OJK berkontribusi pada penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF), yang menunjukkan perbaikan dalam kualitas pembiayaan dan pengelolaan risiko di bank syariah. Program edukasi yang dilaksanakan oleh OJK dan bank syariah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah, yang berkontribusi pada inklusi keuangan. Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, adopsi teknologi digital yang belum optimal, dan persaingan dengan bank konvensional masih perlu diatasi.

Kebijakan OJK seharusnya perlu terus mendukung pengembangan perbankan syariah melalui regulasi yang memfasilitasi inovasi produk dan layanan, serta memperkuat infrastruktur teknologi informasi. Penting untuk melanjutkan program literasi keuangan syariah agar masyarakat lebih memahami manfaat dan produk perbankan syariah, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam sistem keuangan formal. Bank syariah harus berinvestasi dalam teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman nasabah. Ini termasuk pengembangan aplikasi mobile banking dan platform

digital lainnya. Membangun kemitraan dengan sektor lain, seperti fintech, dapat membantu bank syariah dalam memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan daya saing di pasar. OJK perlu terus memperkuat regulasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang benar dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah. Pelatihan dan pengembangan SDM yang memahami prinsip-prinsip syariah dan praktik perbankan yang baik akan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

Secara keseluruhan, kebijakan OJK telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dalam periode 2019 hingga 2023. Melalui berbagai inisiatif dan regulasi yang diterapkan, OJK berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor perbankan syariah, yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Pertumbuhan aset yang substansial, peningkatan pembiayaan, dan perbaikan kualitas pembiayaan menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berhasil dalam meningkatkan daya saing bank syariah, tetapi juga dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Namun, tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah tidak dapat diabaikan. Meskipun ada kemajuan dalam literasi keuangan syariah, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami produk dan layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang keuangan syariah harus terus dilakukan. Program-program literasi yang lebih terstruktur dan terarah akan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga mereka dapat memanfaatkan produk perbankan syariah dengan lebih baik.

Selain itu, adopsi teknologi digital yang belum optimal menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah. Dalam era digital saat ini, kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman nasabah. Oleh karena itu, bank syariah perlu berinvestasi dalam pengembangan platform digital dan aplikasi mobile banking yang dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Persaingan dengan bank konvensional yang lebih mapan juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Untuk dapat bersaing, bank syariah perlu terus berinovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan, serta memperkuat posisi mereka di pasar. Kolaborasi dengan sektor lain, seperti fintech, dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan daya saing.

Dalam konteks ini, OJK memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa regulasi yang diterapkan mendukung pertumbuhan perbankan syariah secara berkelanjutan. Penguatan regulasi dan pengawasan yang ketat akan membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar. Dengan demikian, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional, semua pemangku kepentingan—termasuk OJK, bank syariah, pemerintah, dan masyarakat—perlu bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Dengan strategi yang tepat, inovasi yang berkelanjutan, dan kolaborasi yang kuat, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui upaya bersama ini, diharapkan perbankan syariah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, masa depan perbankan syariah di Indonesia tampak cerah, dan diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan sistem keuangan syariah di negara-negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Bahtiar Effendi. 2023. "Kesiapan Bank Syariah Dalam Menghadapi Resesi 2023." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (1): 637–45. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8015>.
- Kornitasari. 2022. "Peramalan Pertumbuhan Bank Syariah Indonesia Pasca Kebijakan Merger | Kornitasari | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam." 2022. <https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jiei/article/view/5321/2342>.
- Laila Rahmayuni Rangkuti, Maycika Anggreini. 2024. "Hardware Digital Banking Syariah: Tantangan dan Solusi," December. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14475248>.
- Nada, Nabilatun. 2024. "Dinamika Lembaga Dan Aset Lembaga Perbankan Syariah Di Indonesia (Total Lembaga Dan Aset 2019 – Mei 2023)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (1): 903. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.1193>.
- Putri, Deasy Ayu Rahma, and Lucky Rachmawati. 2022. "Analisis Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5 (1):1–12. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p1-12>.
- Rusydiana, Aam Slamet. 2016. "PREDIKSI PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2020 DENGAN QUANTITATIVE METHODS | Rusydiana | JURNAL EKONOMI SYARIAH." 2016. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jes/article/view/1154>.